

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang tidak dapat terlepas dalam pembahasan mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance*. Dalam teori ini disebutkan bahwa terdapat konflik keagenan antara pemilik perusahaan (*principle*) yang ingin mendapatkan laba sebanyak-banyaknya, dan manajemen (*agents*) yang ingin mendapatkan bayaran sesuai kontrak. Hal tersebut menyebabkan *agents* melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan atau disebut dengan masalah keagenan. Masalah keagenan dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*).²⁵

Biaya keagenan (*agency cost*) dapat diminimalisasi dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat menyejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut salah satunya adalah dengan penerapan *Corporate Governance*.²⁶ Mekanisme *Corporate Governance* berfungsi sebagai alat untuk mendisiplinkan pengelola agar menaati kontrak yang telah disepakati. Mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi

²⁵ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governace* (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015). Hlm 20.

²⁶ Kusmayadi, Rudiana, dan Badruzaman. Hlm 21.

kesenjangan dalam perusahaan dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.²⁷

2. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya dalam menyeimbangkan beragam kepentingan *stakeholder*-nya. Para *stakeholder* pada suatu perusahaan ini mencakup segala aspek dari mulai investor, kreditor, pemasok, pelanggan, karyawan, pemerintah dan masyarakat. Apabila perusahaan dapat menyeimbangkan kepentingan para *stakeholder* maka perusahaan juga akan mendapatkan dukungan para *stakeholder* sehingga operasional perusahaan dari mulai penjualan, laba serta pangsa pasar akan meningkat secara berkelanjutan.²⁸

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa dengan adanya bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* salah satunya dengan laporan *Corporate Social Responsibility* yang transparan, akuntabel dan informatif maka keinginan *stakeholder* terpenuhi. *Stakeholder* mengetahui dan menilai operasional perusahaan sehingga dapat menjadi kontrol bagi perusahaan untuk mengevaluasi kegiatan perusahaan. Kesadaran perusahaan mengenai pentingnya keberadaan *stakeholder* dapat menjadikan

²⁷ Hasanah, Widiyanti, dan Sudarno, "Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 7 (2017).

²⁸ Andreas Lako, *Dekonstruksi Corporate Social Responsibility dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi* (Jakarta: Erlangga, 2011). Hlm 51.

perusahaan senantiasa berinovasi dan mengevaluasi sehingga perusahaan dapat berkembang.²⁹

3. Teori Legitimasi

Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Dalam teori legitimasi disebutkan bahwa perusahaan dan masyarakat di sekitarnya memiliki hubungan sosial yang erat karena keduanya terikat dalam “*social contract*.” Teori kontrak sosial menyatakan bahwa keberadaan korporasi atau perusahaan dalam suatu wilayah itu karena terdapat dukungan secara politis dan dilindungi oleh mekanisme peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah yang juga merupakan representasi dari masyarakat.³⁰

Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan agar legitimasi berjalan dengan efektif yaitu dengan melakukan strategi legitimasi dan melaporkan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Perusahaan harus menunjukkan bahwa aktifitas yang dilakukan sesuai dengan batasan yang ada agar stabilitas dan keberlangsungan perusahaan terus berlanjut. Pengungkapan laporan *Corporate Social Responsibility* membuat

²⁹ Lestari, “Pengaruh Tingkat Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan ISR pada Perbankan Syariah Tahun 2010-2014.,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1 (2016).

³⁰ Lako, *Dekonstruksi Corporate Social Responsibility dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*.

masyarakat mengetahui apakah perusahaan beroperasi sesuai batasan atau sebaliknya.³¹

4. *Corporate Governance*

Persoalan *Corporate Governance* akan selalu muncul jika terdapat potensi benturan kepentingan dalam organisasi perusahaan. Benturan kepentingan tersebut berasal dari perbedaan kepentingan dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara berbagai pihak dalam perusahaan. Hal tersebut dapat membuat peluang untuk menyalahgunakan suatu kepentingan sehingga akan berdampak dengan keseimbangan sistem. Maka dibutuhkan sebuah sistem yang jelas agar berbagai perangkat organisasi dapat menjalankan fungsinya secara optimal.³²

Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan semua *stakeholder*. Pemangku kepentingan yang terlibat adalah mulai dari para pemegang saham serta para direktur sampai semua entitas yang mempunyai kepentingan dalam perusahaan pada semua spektrum.³³

³¹ Murdiansyah, "Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawasan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).," *Journal of Islamic Banking and Finance* 1 (2021).

³² Mal An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010). Hlm. 33

³³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011). Hlm. 404.

Penerapan keputusan *Corporate Governance* menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Penerapan dan prinsip praktik *Corporate Governance* akan meningkatkan keyakinan investor terhadap perusahaan. Selain itu, manfaat lain dari penerapan *Corporate Governance*:³⁴

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung perusahaan sebagai akibat dari pendelagasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya ini dapat berupa kerugian akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*) atau biaya pengawas yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan *Corporate Governance* menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam perusahaan semakin kecil seiring turunnya tingkat resiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan, strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan. Pada umumnya para *stakeholder* mendapat

³⁴ Kusmayadi, Rudiana, dan Badruzaman, *Good Corporate Governace*. Hlm. 13.

jaminan bahwa akan mendapatkan manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah lembaga atau institusi, termasuk salah satunya yaitu Bank Syariah. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah harus diwujudkan dalam:³⁵

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank Umum Syariah
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah
4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit, intern dan audit ekstern
5. Batas maksimum penyaluran dana
6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum Syariah.

³⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). Hlm 195-196.

Berdasarkan teori tersebut maka pelaksanaan *Corporate Governance* pada penelitian ini melibatkan dewan komisaris, dewan komisaris independen serta komite audit yang menjalankan fungsi pengendalian *intern* Bank Umum Syariah, diantaranya:

a. Dewan Komisaris

Tanggung jawab dan wewenang pengawasan dewan komisaris:³⁶

1. Tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh dewan komisaris antara lain dengan mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Dalam kaitan ini, dewan komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.
2. Tanggung jawab direksi adalah menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern bank dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan intern bank sesuai dengan kebijakan ataupun arahan dari dewan komisaris.

Dewan komisaris harus menjamin agar SKAI dapat melaksanakan tugas secara independen. Pada hal ini dewan komisaris wajib melakukan pengkajian ulang atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam hal ini, dewan komisaris

³⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Audit Intern Bank*, 1st ed. (Jakarta: Plaza Bapindo, 2014). Hlm 457-458.

berperan sebagai wakil dari pemegang saham dan masyarakat yang perlu melakukan pengawasan.³⁷

Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang harus dilakukan oleh dewan komisaris pada umumnya terdapat pada tiga kategori, yaitu:³⁸

1. Penilaian kecukupan struktur pengendalian internal. Pemeriksaan dan penilaian ini dilakukan untuk menilai sistem yang telah ditetapkan apakah dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan kepercayaan bahwa tujuan dan sasaran bank dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.
2. Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana struktur tersebut telah berfungsi seperti yang diinginkan.
3. Penilaian kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai.

b. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan ataupun hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya. Keberadaan dewan komisaris independen bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan karena tidak

³⁷ Indonesia. Hlm 459

³⁸ Indonesia. Hlm 460

terafiliasi dengan perusahaan sehingga bebas dalam pengambilan keputusan. Proporsi dewan komisaris independen dikatakan sebagai indikator independensi dewan. Kehadiran dewan komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan karena tidak terafiliasi dengan perusahaan sehingga leluasa dalam mengambil keputusan.³⁹

Jumlah dewan komisaris independen wajib minimal 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Apabila presentasi komisaris independen diatas 30% maka pelaksanaan tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga praktik penghindaran pajak menurun. Dewan komisaris independen juga harus memahami Undang-Undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁴⁰

c. Komite Audit

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan

³⁹ Sugiarti, *Etika Bisnis dan Profesi*, 1st ed. (Yogyakarta: Expert, 2020). Hlm 113

⁴⁰ Citrawati Jatiningrum dan Abshor Marantika, *Good Corporate Governance dan Pengungkapan Enterprise Risk Management di Indonesia*, 1st ed. (Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2021). Hlm 40

yang memadai dan pelaksanaan *Corporate Governance*. Tugas komite audit berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dalam manajemen. Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang memuat informasi penting untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan.⁴¹

5. *Return on Assets (ROA)*

Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva perusahaan. ROA dapat mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Semakin besar *Return on Assets* yang dimiliki suatu perusahaan maka perusahaan tersebut semakin efisien dalam meningkatkan laba.⁴² *Return on Assets* dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Laba neto setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

Dalam perspektif Islam, perusahaan harus bersedia untuk memberikan pengungkapan penuh tanpa melihat apakah perusahaan memiliki keuntungan atau tidak. *Return on Assets (ROA)* digunakan untuk

⁴¹ Rahmawati, *Teori Akuntansi Keuangan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). Hlm 176

⁴² Umiyati Umiyati dan Muhammad Danis Baiquni, "Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (2019).

mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan terhadap nilai total asetnya (ROA).⁴³

6. *Islamic Social Reporting*

Corporate Social Responsibility adalah mekanisme untuk 'membersihkan' keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh perusahaan. Hal ini terjadi karena pada operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, terkadang dapat merugikan orang lain baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja.⁴⁴ Menurut *Principle of Wales Foundation* terdapat lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR:⁴⁵

1. Menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia
2. *Environments* yang berbicara tentang lingkungan
3. *Good Corporate Governance*
4. *Social cohesion* artinya dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial
5. *Economic Strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan konsep syariah yang diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab

⁴³ Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*. Hlm 257.

⁴⁴ Joko Prastowo dan Miftachul Huda, *Corporate Social Responsibility* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2011). Hlm 16.

⁴⁵ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm 11-12.

sosial secara Islami. Konsep tanggung jawab sosial sesuai konsep Islam atau dikenal *Islamic Social Reporting* (ISR) pertama kali dikemukakan pada tahun 2002. *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan standar pelaporan kinerja sosial perusahaan berbasis syariah. Indeks ISR dikembangkan dengan standar pelaporan berdasarkan *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI)*. Standar ini merupakan perluasan standar laporan kinerja sosial tidak hanya peran perusahaan dalam perekonomian namun juga peran perusahaan dalam sudut pandang spiritual sebagai bentuk akuntabilitas terhadap Allah SWT dan terhadap masyarakat.⁴⁶

Konsep *Islamic Social Reporting* (ISR) diharapkan mampu melahirkan praktik akuntansi yang sesuai syariat Islam sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap kemajuan ekonomi dan dapat menciptakan praktik bisnis yang lebih adil dan jujur. Konsep ISR ini menjadi jawaban kelemahan pelaporan tradisional, konsep ISR dijiwai dengan ketentuan syariah, moral dan etika.⁴⁷

Pelaporan sosial secara konvensional memiliki keterbatasan sehingga dirumuskan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* yang berdasarkan pada ketentuan syariah. ISR dapat membantu pihak Muslim

⁴⁶ Ros Haniffa, "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective," *Indonesian Management and Accounting Research* 1, no. 2 (2002): 128–46.

⁴⁷ Gustani, "Islamic Social Reporting (ISR) sebagai Model Pelaporan CSR Institusi Bisnis Syariah."

dalam pengambilan keputusan serta membantu perusahaan untuk melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat. Tujuan dari *Islamic Social Reporting* adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat, serta meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual dalam pengambilan keputusan.⁴⁸

Bentuk Akuntabilitas dalam *Islamic Social Reporting*:⁴⁹

1. Menyediakan produk yang halal dan baik
2. Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat
3. Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam
4. Mencapai tujuan usaha bisnis
5. Menjadi karyawan dan masyarakat
6. Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan
7. Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah

Bentuk transparansi:⁵⁰

1. Memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram
2. Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi
3. Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan

⁴⁸ Haniffa, "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective."

⁴⁹ Haniffa.

⁵⁰ Haniffa.

4. Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat
5. Memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan.

Adapun indikator dalam pengungkapan ISR terdiri dari enam tema, yaitu:⁵¹

1. Tema Keuangan dan Investasi. Pada tema ini hal yang perlu diungkapkan meliputi kegiatan riba, gharar, zakat, neraca saat ini serta pernyataan nilai tambah.
2. Tema Produk dan jasa. Perusahaan perlu mengungkapkan hal yang berkaitan dengan produk dan jasa meliputi produk yang ramah lingkungan, produk halal, keamanan dan kualitas produk serta keluhan dalam ketidakpatuhan terhadap peraturan.
3. Tema Karyawan. Hal yang perlu diungkapkan yaitu mengenai indikator yang terkait dengan pengembangan karyawan, keadilan dan kesejahteraan karyawan serta hak karyawan dalam beribadah.
4. Tema Masyarakat. Pada tema ini terdapat pengungkapan mengenai kepedulian serta konpe saling berbagi terhadap masyarakat sekitar seperti pemuda, masyarakat kurang mampu, aspek pendidikan serta kegiatan sosial.

⁵¹ Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani, "Determinants Of Islamic Social Reporting Among Top Shariah -Approved Companies In Bursa Malaysia," *Research Journal of International Studies* 12, no. 12 (2009): 4–20.

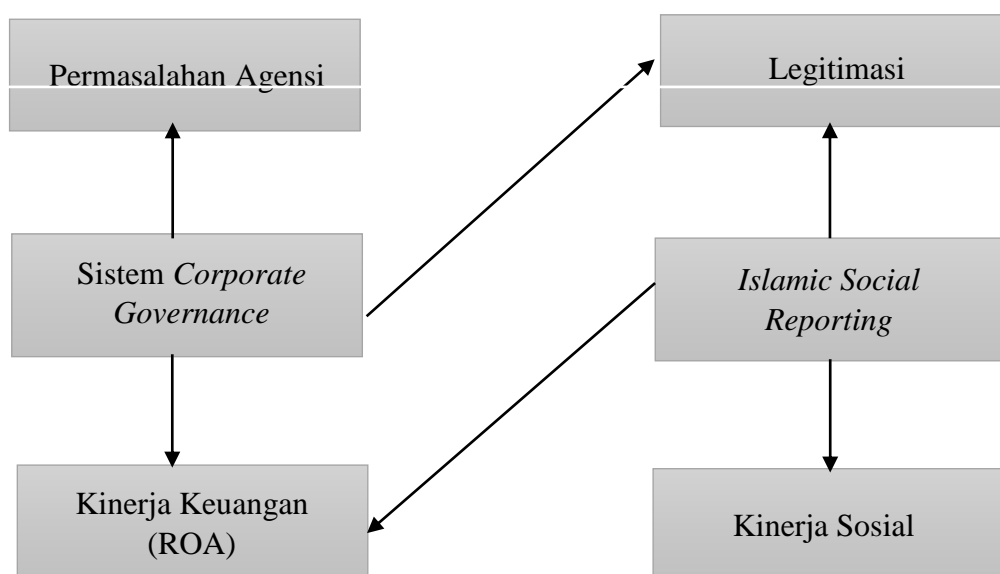
5. Tema Lingkungan. Perlunya pengungkapan terhadap kepedulian perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitar baik tumbuhan maupun hewan, dengan indikator mengurangi pencemaran lingkungan, konservasi lingkungan serta audit lingkungan.
6. Tema Tata Kelola Perusahaan. Tema ini berkaitan dengan pengawasan terhadap aspek kepatuhan syariah dalam perusahaan. Informasi yang diungkapkan berupa status kepatuhan syariah, struktur kepemilikan, kegiatan terlarang seperti monopoli, serta kebijakan anti korupsi.

7. Hubungan *Islamic Social Reporting* terhadap *Corporate Governance* dan *Return on Assets*

Para *stakeholder* khususnya investor sangat mengapresiasi praktik pengungkapan sosial perusahaan sebagai bahan ataupun analisis untuk menilai potensi keberlangsungan usaha dalam suatu perusahaan. Pengungkapan sosial perlu dilakukan dalam praktik yang penuh keterbukaan (*trasparancy*) dan akuntabilitas yang terjamin dari pihak pengelola perusahaan. Hal ini bertujuan agar pengungkapan sosial tidak digunakan sebagai strategi pertahanan diri pihak manajemen ketika melakukan *moral hazard* yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Perilaku manipulatif oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui mekanisme pengawasan atau

monitoring untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yaitu dengan dilaksanakannya *Corporate Governance*.⁵²

Pelaksanaan *Corporate Governance* yang baik akan menghasilkan laporan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih transparan dan akuntabel karena konflik dapat diminimalisir dan kinerja akan lebih maksimal. Kinerja yang maksimal juga akan menghasilkan laba yang lebih optimal. Hubungan antara *Islamic Social Reporting* terhadap *Corporate Governance* dan *Return on Assets* dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Agung, 2011.

Gambar 2. 1 Hubungan ISR dengan CG dan ROA

⁵² R Ery Wibowo Agung, "Keterkaitan Corporate Governance dengan Social Responsibility," *Jurnal Unimus*, 2011.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pijakan penulis dalam melakukan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian dengan objek perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2014-2019. Metode pengambilan data menggunakan metode *purposive sampling* dengan total 60 sampel. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.⁵³

Kedua, penelitian yang dilakukan terhadap seluruh Bank Umum Syariah periode 2012-2016. Penelitian ini penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder, metode penentuan populasi menggunakan metode sensus dimana seluruh objek penelitian dijadikan populasi. Sampel penelitian ini berjumlah 11 Bank dengan lima tahun periode penelitian sehingga jumlah populasi dan sampel sebanyak 55 unit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas, *financial leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif

⁵³ Devi, Tanno, dan Misra, "The Effect of Corporate Governance Mechanism, Company Size, Financial Performance, and Environmental Performance on Islamic Social Reporting Disclosure."

terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Kemudian likuiditas, *financial leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan.⁵⁴

Ketiga, penelitian dengan objek Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan *annual report* periode 2011-2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda, pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 40 laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah komisaris, dewan direksi dan jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* periode 2011-2014.⁵⁵

Keempat, penelitian dengan objek Bank Umum Syariah periode 2016-2020, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, analisis data yang digunakan adalah analisis regresi moderasi, pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 12 Bank Umum Syariah. Hasil Penelitian menunjukkan kepemilikan institusional dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan

⁵⁴ Iqramuddin, Mulia Saputra, dan Muslim A Djalil, "The Effect of Liquidity , Financial Leverage , Profitability and Company Size on Islamic Social Reporting (ISR) Disclosure and Its Impact on Company Value in Sharia Commercial Banks in Indonesia," *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management* 3, no. 6 (2020): 500–510.

⁵⁵ Qoyum et al., "The Impact of Good Corporate Governance, Company Size and Corporate Social Responsibility Disclosure: Case Study of Islamic Banking in Indonesia."

leverage dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR.⁵⁶

Kelima, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan *content analysis*. Sampel penelitian ini adalah delapan Bank Umum Syariah pada periode 2011-2015, menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, sedangkan *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) serta *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.⁵⁷

Berdasarkan penelitian diatas, penulis menemukan perbedaan dalam instrumen dan hasil penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pembahasan pengaruh *Corporate Governance* dan *Return on Assets* terhadap pengungkapan *Islamic Social Responsibility*. Instrumen dalam *Corporate Governance* berfokus pada dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual mengenai teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Konsep kerangka pemikiran menjelaskan hubungan yang

⁵⁶ Nurjanah dan Bawono, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting dengan Ukuran Perusahaan sebagai Varaibel Moderating pada Bank Umum Syariah 2016-2020."

⁵⁷ Umiyati dan Baiquni, "Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia."

memengaruhi pada variabel independen terhadap variabel dependen.⁵⁸ Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *Corporate Governance* dan *Return on Assets* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022.

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan standar pelaporan kinerja sosial perusahaan berbasis syariah. Standar ini merupakan perluasan standar laporan kinerja sosial tidak hanya peran perusahaan dalam perekonomian namun juga peran perusahaan dalam sudut pandang spiritual.⁵⁹ Konsep tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia merupakan sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 3 tentang Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan bertanggung jawab atas terjaminnya kegiatan operasional yang mampu menghasilkan barang dan/atau jasa secara ekonomis, efisien dan bermutu.⁶⁰

Berdasarkan regulasi yang telah ada, maka Bank Umum Syariah (BUS) yang merupakan lembaga keuangan berdasarkan syariat Islam memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 19th ed. (Bandung: CV Alfabeta, 2013). Hlm 60.

⁵⁹ Haniffa, "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective."

⁶⁰ Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum, "Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia," Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, 2023.

berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Akan tetapi, di Indonesia belum ada standarisasi pengungkapan tanggung jawab sosial untuk entitas syariah. Entitas syariah terutama BUS masih menggunakan acuan pada *Global Reporting Initiative* (GRI) yang dinilai belum memenuhi aspek syariah.⁶¹ Oleh karena itu, pengujian mengenai pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia diperlukan.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan informasi perusahaan adalah penerapan tata kelola perusahaan atau dikenal dengan istilah *Corporate Governance* (CG). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan *Corporate Governance* merupakan satu kesatuan dalam dunia bisnis. Dua hal tersebut memiliki prinsip yang sejalan yaitu CSR memiliki prinsip yang berorientasi pada *stakeholder* (pemangku kepentingan) sejalan dengan prinsip *responsibility* (tanggung jawab) pada *Corporate Governance*.⁶²

Terdapat beberapa indikator untuk mengukur tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance* (CG) salah satunya adalah dewan komisaris. Sebagai jabatan tertinggi dewan komisaris memiliki peran untuk melakukan pemantauan dan nasihat kepada direksi untuk memastikan telah dilaksanakannya tata kelola perusahaan. Dalam hal ini, dewan komisaris berperan sebagai wakil dari pemegang saham dan masyarakat yang perlu

⁶¹ Qoyum et al., "The Impact of Good Corporate Governance , Company Size and Corporate Social Responsibility Disclosure : Case Study of Islamic Banking in Indonesia."

⁶² Ganis Bina Desy Ariyani, "Analisis Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening," (2020).

melakukan pengawasan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.⁶³

Selain dewan komisaris, terdapat juga dewan komisaris independen yang memiliki peran yang penting dalam menjalankan fungsi pengawasan di perusahaan. Dewan komisaris independen memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang yang berlaku, termasuk terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kehadiran dewan komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan karena tidak terafiliasi dengan perusahaan sehingga leluasa dalam mengambil keputusan.⁶⁴

Selanjutnya, terdapat komite audit yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga komite audit ini mendorong pihak manajemen agar tidak hanya melaporkan keuangan saja melainkan dengan melakukan kinerja lingkungan dan sosial juga. Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang memuat informasi penting untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan.⁶⁵

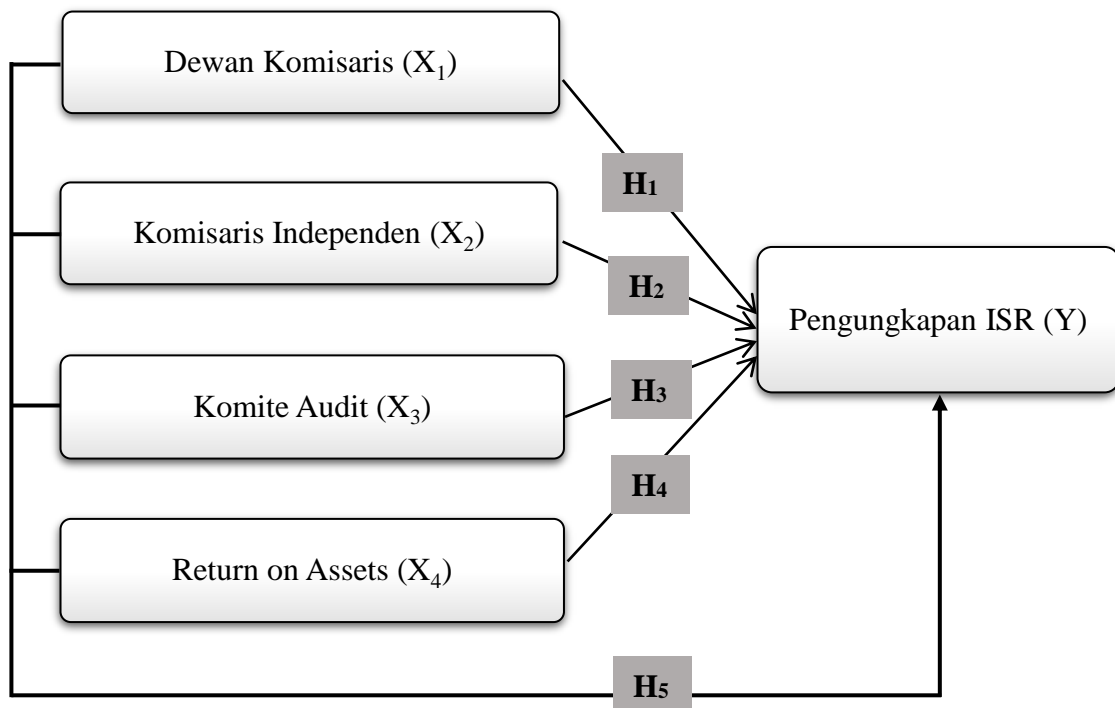
Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) juga dapat dipengaruhi oleh kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA). ROA

⁶³ Indonesia, *Memahami Audit Intern Bank*. Hlm 459.

⁶⁴ Sugiarti, *Etika Bisnis dan Profesi*. Hlm 113.

⁶⁵ Rahmawati, *Teori Akuntansi Keuangan*. Hlm 176

merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin besar laba maka akan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan hal tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban hanya didasarkan pada teori yang sesuai bukan pada fakta empiris yang dikumpulkan melalui pengumpulan data. Hipotesis dapat diartikulasikan sebagai respon teoritis atas rumusan penelitian bukan respon empiris.⁶⁶

Penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen ini merupakan *Islamic Social Reporting*, kemudian variabel independen merupakan instrumen dari *Corporate Governance* dan *Return on Assets*. Pada variabel *Corporate Governance* memiliki tiga instrumen yang akan diteliti diantaranya dewan komisaris (X_1), komisaris independen (X_2) dan komite audit (X_3) serta mengangkat variabel *Return on Assets* (X_4). Hipotesis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

H₁: Dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Hlm 63.

2. Hipotesis 2

H₂: Dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022.

3. Hipotesis 3

H₃: Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022.

4. Hipotesis 4

H₄: *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022.

5. Hipotesis 5

H₅: Dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, *Return on Asset*, berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022.